

## HASIL PENELITIAN

### ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA



#### Peneliti :

JAJUK SUPRIJATI,SE.,MM	0727037001
SHANTY RATNA DAMAYANTI,SE.,M.Si	0726057001
MANDIMIN YIKWA	2013310003

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DR SOETOMO  
APRIL 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA
2. ketua penelitian
- a Nama Lengkap dengan gelar : Jajuk Suprijati, SE., MM
  - b Pangkat/Gol/NIDN : Penata Muda/ IIIb /0727037001
  - c Jabatan Fungsional/Struktural : Lektor
  - d Program Studi/Jurusan : Ekonomi Pembangunan
  - e Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
  - f No.HP : 085100605868
  - g E-mail : jajuksuprijati@gmail.com
3. Jumlah anggota peneliti
- a Nama Lengkap dengan gelar : Shanty Ratna Damayanti, SE., M.Si
  - b Pangkat/Gol/NIDN : Penata/IIIc/0726057001
  - c Jabatan Fungsional/Struktural : Lektor
  - d Nama Lengkap : Mandimin Yikwa
  - e NIM : 2013310003
4. Lokasi Penelitian : Indonesia
5. Kerjasama (kalau ada) : -
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. biaya penelitian :
- a DIPA Penelitian Unitomo :
  - b Sumber lain / Mandiri : Rp 5.000.000

Surabaya, 30 Juni 2021

Ketua Peneliti

Jajuk Suprijati, SE., MM

NPP. 98.01.1.280

Mengetahui,

Ketua

FX Susanto Soekiman, MM

NPP. 02.01.1.385

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Dr. Soetomo



Kurnia Hartati, MP

NPP. 95.01.1.198

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Kajian Teoritis.....	13
2.2.1. Konsep Desentralisasi Fiskal .....	13
2.2.2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	16
2.2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	19
2.2.4. Rasio Keuangan Daerah .....	22
2.2.5. Kemiskinan .....	30
2.2.6. Kemiskinan Menurut Undang-Undang Pemerintah .....	32
2.2.7. Penyebab dan Dampak Kemiskinan .....	34
2.2.8. Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan .....	36
2.3. KerangkaKonseptual .....	37
2.4. Hipotesa .....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	39

3.1.	Pendekatan Penelitian .....	39
3.2.	Rancangan Penelitian .....	39
3.3.	Lokasi Penelitian .....	40
3.4.	Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukurannya.....	40
3.4.1.	Identifikasi variabel .....	40
3.4.2.	Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal (RDDF) $X_1$ .....	41
3.4.3.	Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah (REPD) $X_2$ .....	41
3.4.4.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) $X_3$ .....	41
3.4.5.	Aktivitas Keuangan Daerah (AKD) $X_4$ .....	42
3.5.	Populasi dan Sampel .....	42
3.6.	Jenis dan Sumber Data .....	42
3.6.1.	Jenis Data .....	42
3.6.2.	Sumber Data .....	42
3.7.	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.8.	Teknik Analisis .....	43
3.9.	Analisis Regresi Berganda .....	43
3.10.	Pengujian Hipotesis .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>48</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
4.2	Pengelolaan Potensi .....	54
4.3	Analisis Data .....	58
4.4	Hasil Analisis Data .....	61
4.5	Pembahasan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
5.1.	Kesimpulan Dan Saran .....	72
5.2.	Kesimpulan .....	72
5.3.	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Persamaan dan Perbedaan Peneliti ke 1 Terdahulu dan Sekarang .....	10
Tabel 2.2.	Persamaan dan Perbedaan Peneliti ke 2 Terdahulu dan Sekarang .....	11
Tabel 2.3.	Persamaan dan Perbedaan Peneliti ke 3 Terdahulu dan Sekarang .....	12
Tabel 2.4.	Perkembangan dasar hukum pengelolaan keuangan Daerah .....	22
Tabel 2.5.	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah .....	24
Tabel 2.6.	Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	26
Tabel 2.7.	Kriteria Pengukuran Efisiensi Keuangan Daerah .....	27
Tabel 4.1.	Laporan RDDF Periode 2004-2016 .....	58
Tabel 4.2.	Laporan REPD Periode 2004-2016 .....	59
Tabel 4.3.	Laporan REKD Periode 2004-2016 .....	59
Tabel 4.4.	Laporan AKD Periode 2004-2016 .....	60
Tabel 4.5.	Laporan Jumlah Penduduk Miskin Periode 2004-2016 .....	61
Tabel 4.6.	Hasil Regresi Pengaruh RDDF, REPD, REKD, AKD terhadap tingkat kemiskinan .....	62
Tabel 4.7.	Hasil Koefisien Determinasi Pengaruh RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_3$ ) Terhadap Tingkat Kemiskinan .....	63
Tabel 4.8.	Hasil Uji Kesesuaian Model Pengaruh RDDF, REPD, REKD, AKD terhadap (Y) .....	65
Tabel 4.9.	Hasil Analisis Uji t Pengaruh RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ), terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Koseptual .....	37
Gambar 3.1.	Daerah Penerimaan Ho Dan Penolakan Untuk Uji F .....	45
Gambar 3.2.	Daerah penerimaan dan penolakan Ho untuk uji dua sisi ...	47

## ABSTRAK

### **Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua**

Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah berasal dari ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah dan mengelola realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah serta mengelola Aktivitas Keuangan Daerah. Melalui otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua, memberikan peluang yang besar dalam hal pembiayaan pembangunan dan meningkatkan dalam kemiskinan masyarakat. Dengan perhatian khusus ini diharapkan mampu mengatasi masalah ketertinggalan dan keterbelakangan Provinsi Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Proses atau usaha ini diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Propinsi Papua. Berdasarkan latar belakang diatas ditarik rumusan masalah : Apakah pengelolaan Keuangan daerah berupa RDDF, REPD, REKD dan AKD Berpengaruh sigmifikan terhadap tingkat kemiskinan?

Terkait dengan permasalahan tersebut, kajian teori yang dipakai adalah tentang desentralisasi fiskal, pengertian PAD, pengelolaan keuangan daerah, rasio keuangan daerah dan tentang kemiskinan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu rancangan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada kantor BPS Propinsi Papua mengenai APBD dan pengelolaannya. Adapun variabel yang akan diteliti adalah RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) sebagai variabel bebas dan variabel terikat yaitu Tingkat Kemiskinan (Y) masyarakat Papua dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terbukti variabel RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) yang ditandai dengan nilai Nilai F hitung  $\geq F$  tabel yaitu  $4,772 \geq 3,26$  maka  $H_0$  ditolak , hal ini menunjukkan bahwa variabel RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikasi =  $0,0364 < \alpha = 0,05$

Kemudian pada uji t diketahui bahwa variabel bebas perpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dengan  $t_{tabel} \geq t_{hitung}$ , dimana  $t_{tabel}$  diperoleh sebesar 1,7959. RDDF ( $X_1$ )  $1,7959 \geq - 0,358$ , REPD ( $X_2$ )  $1,7959 \geq - 0,688$ , variabel REKD ( $X_3$ )  $1,7959 \geq 0,702$ .Ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh parsial dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y), lebih kecil dari 5%. Sedangkan untuk, AKD ( $X_4$ )  $1,7959 \geq 0,539$  maka dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh parsial tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) karena tingkat signifikasinya  $\geq 5\%$ .

**Kata kunci : Derajat Desentralisassi Fisikal, Rasio, Efektivitas, Pendapatan, Keuangan, Aktivitas**

## KATA PENGATAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbilalamin* segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua”.

Dalam penelitian ini tidak lepas dari kerjasama dan bantuan dari berbagai banyak pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Siti Marwiyah , SH, MH Selaku Rektor Universitas DR Soetomo  
Surabaya
2. Dr.Ir. J.F.X Susanto S, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  
DR Soetomo Surabaya.
3. Ibu Dr.Fadjar Kurnia Hartati,MP selaku ketua Lemlit Dr Soetomo  
Surabaya

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan tulisan ini

.Surabaya, Juni 2021

Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut mestinya diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh hingga Papua. Meskipun ada cita-cita membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, Namun yang terjadi di Papua hingga saat ini masih sebaliknya. Provinsi Papua sejak berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Irian Barat kemudian Irian Jaya dan sekarang Papua dalam perjalanannya penuh dengan permasalahan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang.

Pada era transformasi di Indonesia , maka dalam hubungan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan kepanjangan tangan pusat didaerah. Sedang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah dibuka keleluasaan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi khusus daerah adalah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan pemekaran daerah adalah merupakan pembagian atau pemecahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi lebih dari satu daerah. Dalam pelaksanaan otonomi, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Otonomi khusus daerah provinsi Papua adalah merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.

Pada tahun 2001 delegasi Papua memperjuangkan adanya kebijakan “otonomi khusus” bagi Papua. Setelah melalui pengkajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak yang terkait, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden memberikan persetujuan untuk menerbitkan kebijakan Otonomi Khusus. Kebijakan ini tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) bagi Provinsi Papua, yang saat itu ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 21 November 2001. Pada tahun 2003, diterbitkan keputusan oleh Presiden Megawati.

Presiden (Keppres) No. 1 Tahun 2003 yang membagi Provinsi Papua menjadi dua: Papua dan Irian Jaya Barat. Pada saat ini, berkembang wacana untuk membagi Papua menjadi dua provinsi baru, Papua Barat dan Papua Tengah. Undang-Undang Otsus bagi Provinsi Papua ini merupakan pengakuan Pemerintah RI untuk melindungi hak orang Papua akan tanah, air, dan kekayaan Papua.

Inilah prasyarat untuk mengangkat orang Papua dari ketertinggalan dibanding saudaranya di kawasan barat tengah dan timur Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 21 Tahun 2001, berisi bahwa otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua dalam mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas menunjukkan tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua. Terdapat lima sektor prioritas strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi Tingkat kemiskinan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan infrastruktur pembangunan.
3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan.
4. Mengembangkan prasarana dasar untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah di sepanjang garis perbatasan negara.
5. Mengambil tindakan tepat yang dapat meningkatkan mutu sumber daya masyarakat asli Papua.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi social budaya dan perekonomian masyarakat Papua, terutama terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan sebagai pembanguan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan

ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan tertuang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelola keuangan daerah dalam tahun tertentu yang berisi pendapatan dan pembiayaan dana pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib Provinsi Papua. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan, prioritas utama dalam perekonomian adalah pembangunan yang dilakukan di semua sektor karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Optimalisasi dan prioritas belanja akan menumbuhkan perekonomian yang berdampak secara langsung terhadap pengurangan pengangguran dan mengatasi permasalahan kemiskinan.

Dritsakis dan Adamopoulus (2004) membuktikan bahwa belanja negara berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa apabila perekonomian meningkat maka daya serap angkatan kerja juga akan meningkat sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang dan kemungkinan besar dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di

suatu daerah. Namun yang terjadi sekarang adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang semakin meningkat tetapi tidak di dukung oleh pertumbuhan lapangan kerja sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran semakin serius. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dan terus menunjukkan perbaikan selama beberapa tahun terakhir tidak berarti pekerjaan pemerintah telah selesai, kegiatan di sejumlah sektor khususnya di sektor riil masih di bawah kapasitas. Pertumbuhan ekonomi juga belum mampu menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

Dilain sisi Aktivitas Keuangan Daerah juga dapat dioptimalkan di Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus yaitu melalui penetapan anggaran belanja daerah yang alokasinya sudah disesuaikan melalui kebijakan strategis yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan publik, mendorong adanya akselerasi pembangunan, dan sebagai instrumen pemberdayaan seluruh masyarakat Papua, terutama penduduk orang asli Papua.

Adapun tujuan utama dari pengalokasian Aktivitas Keuangan Daerah adalah terutama pada Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat berbeda jauh dengan daerah lain di Indonesia, selain itu juga memberikan kesempatan yang revelan bagi orang asli Papua sebagai subjek pembangunan, dimana selama ini selalu menjadi objek pembangunan. Aktivitas Keuangan Daerah ini berfungsi untuk mengatasi penurunan dari tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2013, penduduk miskin di Indonesia sebesar 28.594.600 orang atau 11,66 persen dari

total penduduk Indonesia, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan jumlah persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Tujuan dilakukannya realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah serta Aktivitas Keuangan Daerah merupakan implementasi dari pemberian otonomi khusus yaitu supaya daerah yang bersangkutan bisa mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi prinsip otonom yang nyata dan bertanggung jawab dalam undang-undang yang mengatur daerah membuka kemungkinan untuk daerah otonomi. Maksud dari hal ini adalah untuk meningkatkan daya guna dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan.

Kunci utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah melainkan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah dan mengelola realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah serta mengelola Aktivitas Keuangan Daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berfokus pada pembangunan yang berpusat pada manusia. Di era otonomi terlebih atas perhatian khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua melalui otonomi khusus, memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua dalam hal pembiayaan pembangunan dan meningkatkan dalam kemiskinan masyarakat. Sehingga dengan perhatian khusus ini diharapkan mampu mengatasi masalah ketertinggalan dan keterbelakangan Provinsi Papua dibandingkan dengan

provinsi lainnya di Indonesia, proses atau usaha ini yang dilakukan untuk melakukan suatu perubahan kearah yang lebih baik dimasa depan. Perubahan yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kesenjangan dengan wilayah lain di Indonesia.

Pada dasarNya Penelitian ini berusaha ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan APBD, keuangan daerah Provinsi papua dapat pengaruh disignifikan terhadap tingkat kemiskinan, Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian adalah: “**Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi papua**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat di rumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan Keuangan daerah berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal (RDDF), Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?
2. Apakah pengelolaan Keuanagan daerah berupa Rasio Efektivitas Pendapatan (REPD), Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?
3. Apakah pengelolaan Keuangan daerah Berupa Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?

4. Apakah pengelolaan Keuangan daerah berupa Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (AKD), Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Keuangan daerah berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal (RDDF), Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Keuangan daerah berupa Rasio Efektivitas Pendapatan (REP D), Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3. Untuk Mengetahui pengelolaan Keuangan daerah Berupa Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
4. Untuk Mengetahui pengelolaan Keuangan daerah berupa Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (AKD), Berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Peneliti ini bermanfaat bagi peneliti sebagai suatu bentuk aplikasi pemahaman yang lebih mendalam pada ilmu-ilmu yang sudah dialami selama menempuh studi di Universitas Dr. Soetomo Surabaya
2. Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah daerah provinsi Papua Bagaimana pengelolaan APBD keuangan daerah provinsi Papua dengan mengukur melalui RDDF, REPD, REKD, AKD, terhadap mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
3. Bagi akademik: Sebagai bahan informasi atau referensi berbagai pihak yang memerlukan data tentang Pengaruh pengelolaan APBD keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Ada beberapa Penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana APBD daerah yaitu:

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Ke-1 dan Sekarang**

<b>keterangan</b>	<b>Hutajulu, (2011)</b>	<b>Penelitian sekarang (2021)</b>
Judul	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura papua.	Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi papua
Tahun penelitian	2011	2021
Variabel bebas	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, RDDDF,REKD,AKD	Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah, RDDDF,REPD, REKD, AKD
Variabel terikat	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
Jumlah	Populasi penelitian dari	Populasi penelitian dari

sampel	pengelolaaan keuangan daerah kabupaten jayapura papua	pengelolaaan keuangan daerah pemerintah Provinsi papua periode tahun 2005-2020.
Objek penelitian	Kabupaten jayapura papua	Provinsi papua
Teknik analisis	Analisis regresi linear berganda	Analisis regresi linear berganda

Tabel 2.2

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Ke-2 dan Sekarang**

<b>keterangan</b>	<b>Saraun, (2013)</b>	<b>Penelitian sekarang (2021)</b>
Judul	Analisis pengaruh dana otonomi khusus, terhadap belanja modal pendapatan perkapita antar kabupaten kota di provinsi Papua.	Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi papau
Tahun penelitian	2013	2021
Variabel bebas	pengaruh dana otonomi khusus, RDDF, REKD, AKD	Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah, RDDF, REPD, REKD, AKD
Variabel Terikat	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
Jumlah	Terdiri dari 9 kabupaten	Populasi penelitian dalam

sampel	di provinsi papua	pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi papua periode tahun 2005-2020.
Objek penelitian	Antar kabupaten kota di provinsi papua	Provinsi papua
Teknik analisis	Analisis regresi linear berganda	Analisis regresi linear berganda

**Tabel 2.3**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Ke-3 dan Sekarang**

<b>keterangan</b>	<b>Pramad Yanti, (2015)</b>	<b>Penelitian sekarang (2021)</b>
Judul	Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Papua.	Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi papau.
Tahun penelitian	2015	2021
Variabel bebas	Pengaruh dana otonomi khusus, RDDF, REPD, REKD, AKD, RPT	Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah, RDDF, REPD, REKD, AKD
Variabel Terikat	Tingkat Kesejahteraan	Tingkat Kemiskinan

Jumlah sampel	Populasi penelitian dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi papua.	Populasi penelitian dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi papua periode tahun 2005-2021.
Objek penelitian	Provinsi papua	Provinsi papua
Teknik analisis	Analisis regresi linear berganda	Analisis regresi linear berganda

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah sebuah instrumen guna mencapai salah satu tujuan bernegara, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan membangun proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi mewujudkan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Bird, 2000).

Desentralisasi fiskal adalah salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka pemerintah pusat harus memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat. Dukungan finansial tersebut juga berupa sumber-sumber keuangan yang

memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pada hakekatnya dalam hal otonomi daerah mengemban tiga fungsi utama, antara lain fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz, 2000). Pertama fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Kedua fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Ketiga fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam memengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurut Halim (2007) pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat yang akuntabel dalam melakukan pengawasan.
2. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
3. Stabilitas politik yang kondusif.
4. Pengambilan keputusan di daerah harus melalui proses yang demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan memengaruhi keputusan -keputusan tersebut.

5. Desain kebijakan keputusan yang diambil, sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah.
6. Kualitas sumberdaya manusia yang harus kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.

Teori yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout yang dikenal sebagai "The Tiebout Model" yang terkenal dengan ungkapannya "*Love it or leave it*" (Stiglitz, 2000). Penekanan pendapat Tiebout adalah bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Sebaliknya Ketika etika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah local dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD-nya. Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (*maximizing social welfare*) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal (Stiglitz, 2000).

### 2.2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan (Damang, 2011). Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulair*). Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Dua jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan fungsi *regulair* merupakan fungsi tambahan dari pajak, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk mengarahkan perilaku warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, agar masyarakat tidak mengonsumsi minuman beralkohol, maka jenis barang ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan keuangan daerah tentunya diarahkan untuk mendukung meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Sehingga mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Penjelasan UU No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi

Ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, telah membawa

pembangunan yang cukup besar dan mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah.

Pemberian tanggung jawab tersebut memberikan implikasi langsung adalah daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan uang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sumber pembiayaan diharapkan dari penerimaan daerah yang diatur dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang penerimaan meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang sah:
  1. Pendapatan Asli Daerah
  2. Hasil Pajak Daerah
  3. Hasil Retribusi Daerah
  4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan,
  5. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
  6. Dana Perimbangan
  7. Pinjaman Daerah dan,
  8. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
  1. Sumbangan dari pemerintah
  2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
  3. Pendapatan lain-lain yang sah

Peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi, melalui upaya :
  1. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
  2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
  3. Mengintensifikasi retribusi daerah yang ada.
  4. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
- b. Ekstensifikasi : Penggalan sumber-sumber penerimaan baru bersumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

### 2.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal. Menurut (Halim, 2007:23) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP. Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi:

1. Analisis penerimaan : yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis pengeluaran : yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Analisis anggaran : yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah. APBD adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk

kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode, yang biasanya satu tahun. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, dan belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Tabel 2.4 menunjukkan perkembangan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah semenjak diberlakukannya desentralisasi fiskal.

**Tabel 2.4**  
**Perkembangan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah**

Dasar Hukum	Sebelum dan Sekarang	Dasar Hukum	Sekarang dan Nanti
UU 22/1999	1.Pemerintahan Daerah	UU 17/2003	Keuangan Negara
UU 25/1999	1.Perimbangan Keuangan Pemerintah 2.Pusat dan Pemerintah Daerah.	UU 1/2004 UU 32/2004	Perbendaharaan Negara Pemerintahan daerah
PP 105/2000	Pengelolaan Keuangan Daerah	UU 33/2004	Perimbangan Keuangan
KMDN 29/2002	1. Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban 2. Pengawasan Keuangan Daerah	PP 24/2005 PP 58/2005	Pemerintah Pusat Standar Akuntansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan daerah
Permendagri 13/2006	1.Pedoman Pengelolaan Keuangan		

Sumber : Halim, 2007.

#### **2.2.4 Rasio Keuangan Daerah**

Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik

khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012 : 4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor. Kinerja Keuangan Daerah dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Rasio Efektivitas PAD,
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah,

3. Rasio Keserasian,
4. Rasio Pertumbuhan

#### 2.2.4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kemandirian daerah yang semakin tinggi dan rasio kemandirian dapat dihitung dengan melihat Rasio derajat desentralisasi Fisikal (RDDF) yang merupakan rasio antara PAD dibagi dengan total pendapatan daerah, Dalam bentuk matematis dapat ditulis:

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**

#### **Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

#### 2.2.4.2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6**  
**Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
(x > 100%)	Efektif
(x = 100%)	Efektivitas Berimbang
(x < 100%)	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

### 2.2.4.3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013 : 112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.7**

#### **Kriteria Pengukuran Efisiensi Keuangan Daerah**

Persentase	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mohammad Mahsun (2011:187)

### 2.2.4.4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 : 236) semakin tinggi

persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

a. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 : 164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010 : 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

#### **2.2.4.5. Rasio Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 : 138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja

anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahunan } t - \text{Pendapatan Tahunan } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahunan } (t-1)}$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008 : 241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

### **2.2.5 Kemiskinan**

Pengertian kemiskinan adalah Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang, sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Secara umum, istilah miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah kita artikan sebagai suatu kondisi yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep

kurang maupun minim dilihat secara komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang di lain pihak. Pengertian minim disini bersifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda. Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012: 2-4).

Beberapa ahli mengemukakan definisi kemiskinan:

1. Mencher (dalam Siagian, 2012 : 5) mengemukakan, kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.
2. Pearce (dalam Siagian, 2012: 7) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan modal, dengan sumber daya manusia serta kelembagaan.
3. Castells (dalam Siagian, 2012: 10) mengemukakan, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup. Kemiskinan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan, karena topik ini merupakan isu sentral dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan juga merupakan masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Berbagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik sebelum ataupun setelah krisis ekonomi.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sebelum krisis ekonomi diantaranya adalah pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung

dan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Namun usaha pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yang telah dilakukan baik tingkat nasional maupun daerah, tampaknya belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Bahkan beberapa daerah di Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi saat ini. Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat kemiskinan di provinsi Maluku dan Papua pada tahun 2003 masih di atas 30 persen. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Susenas, 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dua kali lipat banyaknya dibandingkan angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat penduduk miskin sebanyak 7,2 juta di perkotaan dan 15,3 juta jiwa di perdesaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi.
2. Bagaimana keterkaitan antara tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi.
3. Bagaimana kasus kemiskinan di provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tingkat kemiskinan yang rendah pula.

### 2.2.6 Kemiskinan Menurut Undang-Undang Pemerintah

Dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dijelaskan pada beberapa pasal yaitu :

Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan tentang kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 5 dijelaskan Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pada pasal 7 dijelaskan tentang penanganan sebagai berikut :

(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengembangan potensi diri;
- b. Bantuan pangan dan sandang;
- c. Penyediaan pelayanan perumahan;
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. Bantuan hukum; dan/atau
- h. Pelayanan sosial.

(2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. Peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. Kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
- e. Koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sedangkan mengenai Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskin disebutkan pula pada Undang-Undang Pemerintah Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dijelaskan pada pasal 12 yaitu :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- 2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

### **2.2.7 Penyebab dan Dampak Kemiskinan**

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa

jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Dan penyebab lain diantaranya yaitu:

1. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.

Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.

2. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. Kemiskinan menurut Ismawan (2003:102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas, keterbatasan modal, keterbatasan akses manusia, maka mempunyai pilihan untuk mengembangkan hidupnya pun rendah, kecuali menjalankan apa saja terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

### **2.2.8 Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan**

Pertumbuhan kesenjangan merupakan hubungan antara pertumbuhan dan tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan antar daerah provinsi Indonesia.

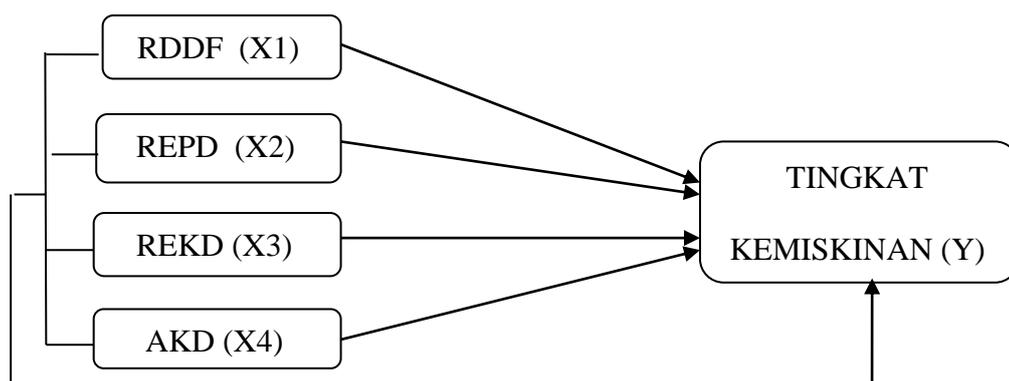
Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas

rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara substansial dapat menaikkan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor (Ferreira, 1999:4). Versi dinamis dari Kuznet Hypothesis, menyebutkan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun (dasawarsa) memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial level of income (Deininger & Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berlandaskan landasan teori yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa factor yang berpengaruh dari Pengelolaan keuangan daerah terhadap RDDF, REPD, REKD, AKD, akan berpengaruh besar disignifikan pada tingkat kemiskinan. Untuk lebih detailnya pengaruh-pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

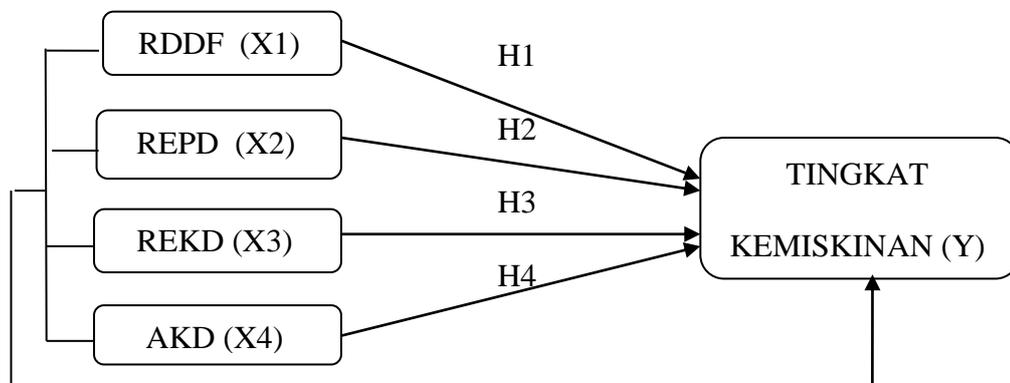
**Gambar 2.1 Kerangka Koseptual**



## 2.4 Hipotesis

1. Pengelolahan Keuangan daerah berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal (RDDF), Berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
2. Pengelolaan Keuanagan daerah berupa Rasio Efektivitas Pendapatan (REPD), Berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
3. Pengelolaan Keuangan daerah Berupa Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) Berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
4. Pengelolaan Keuangan daerah berupa Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (AKD), Berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

**Gambar 2.2 Kerangka Hipotesis**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menganalisis data APBD Keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan, kemudian rasio tersebut dibandingkan dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan uji statistic. Pendekatan penelitian yang dipakai oleh penelitian ini adalah secara kuantitatif karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder seperti menganalisis data realisasi APBD pada Propinsi Papua periode 2004 – 2016.

#### **3.2 Rancangan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

1. Melakukan pencarian referensi dan beberapa sumber penelitian terdahulu.
2. Menentukan judul.
3. Melakukan pendekatan penelitian mewawancarai kepada pihak kantor BPS provinsi Jawa Timur, data mengenai APBD provinsi Papua.
4. Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara metode sekunder.
5. Pengolahan data, pada tahap ini penulis mengolah data menggunakan program SPSS Versi 19 for windows.

6. Waktu penelitian mulai awal Maret Sampai dengan akhir Mei 2017.
7. Kesimpulan dan Saran, pada tahap akhir penulis membuat hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari semua proses penelitian.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tempat di jalan rungkut kantor BPS Propinsi Jawa Timur.

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian mengambil data sekunder yaitu dengan menentukan data atau informasi melalui akses internal yang diperlukan untuk penelitian ini.

### **3.4 Identifikasi Variabel, Devinisi Operasional Dan Pengukurannya**

#### **3.4.1 Identifikasi variabel**

##### **a. Variable Bebas**

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel tak bebas (Y) yaitu: Tingkat Kemiskinan Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah:

(X1) = Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal (RDDDF)

(X2) = Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah (REPD)

(X3) = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

(X4) = Aktivitas Keuangan Daerah (AKD)

##### **b. Variabel terikat Tingkat Kemiskinan (Y)**

### 3.4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal (RDDF) X<sub>1</sub>

Rasio Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2011) Rumusan rasio derajat desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2011) yaitu :

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

### 3.4.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah (REPD) X<sub>2</sub>

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, diukur dengan:

$$\text{REPD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

### 3.4.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) X<sub>3</sub>

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Rasio efisiensi (Hamzah, 2006 dalam Kurniati, 2012) diukur dengan:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan daerah}}{\text{Realisasi Pengeluaran daerah}} \times 100\%$$

### **3.4.5 Aktivitas Keuangan Daerah (AKD) X<sub>4</sub>**

Rasio aktifitas keuangan daerah (keserasian belanja modal) dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2008):

$$\text{AKD} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

### **3.5 Populasi dan Sampel**

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sample , karena data yang digunakan adalah data skunder yang diambil dari BPS pemerintah Provinsi Papua tentang keuangan daerah periode tahun 2015 -2020

### **3.6 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.6.1 Jenis Data**

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan pengelolaan Anggran daerah di Papua Provinsi papua Perode 2004-2016.

#### **3.6.2 Sumber Data**

Sumber data antara lain berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi papua, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua (BKPMD).

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Upaya dalam melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka ditempuh cara berikut:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai literature untuk memperoleh informasi atau peralatan dasar yang berkaitan dengan penelitian. Seperti majalah-majalah, buletin-buletin, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## 2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu penelitian yang langsung dilakukan di tempat atau instansi terkait yang menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### 3.8 Teknik Analisis

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan hasil penelitian ini khususnya tentang variabel-variabel penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 3.8.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel tergantung dari nilai variabel bebas yang sudah diketahui (Imam Ghazali; 2011 : 7) . Pengertian *regresi linear* berganda adalah metode statistic untuk menguji hubungan antara lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Tingkat Kemiskinan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien Regresi

$X_1$  = koefisien regresi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF)

$X_2$  = koefisien regresi Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah (REPD)

$X_3$  = koefisien regresi Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

$X_4$  = koefisien regresi Aktifitas Keuangan Daerah (AKD)

$e$  = variable pengganggu diluar model

### 3.8.2 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji F (uji simultan)

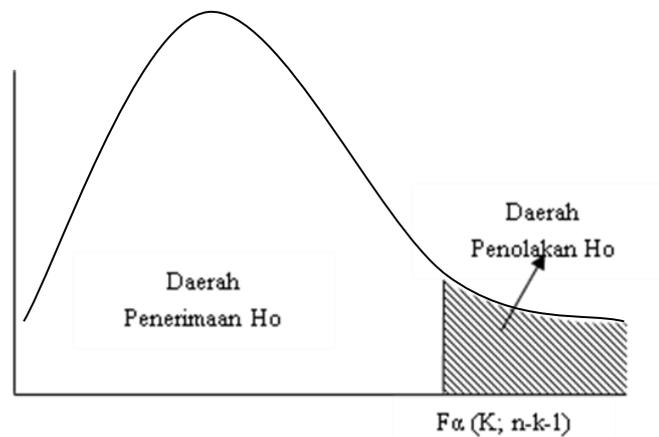
Uji F ini di gunakan untuk melihat apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Imam Ghozali; 2011: 98). Dalam penelitian ini variabel bebas ( $X_1$ ) ( $X_2$ ) ( $X_3$ ) ( $X_4$ ) (yang diantaranya adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal (RDDDF), Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah (REPD), Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD), Aktivitas Keuangan Daerah (AKD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel ( $Y$ ) yaitu: Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua tahun 2005-2020. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

- a. Merumuskan formulasi atau uji hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , artinya semua variabel bebas (X) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , artinya semua variabel bebas (X) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

- b. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5 persen  
 c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan  $H_0$



**Gambar 3.1 Daerah Penerimaan  $H_0$  Dan Penolakan Untuk Uji F**

- d. Menghitung uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

**$F = \text{Error! Reference source not found.}$**

Keterangan:

SSR = SUM of squares from regression

SSE = SUM of squares from sampling error

N = banyaknya data

K = jumlah variabel bebas

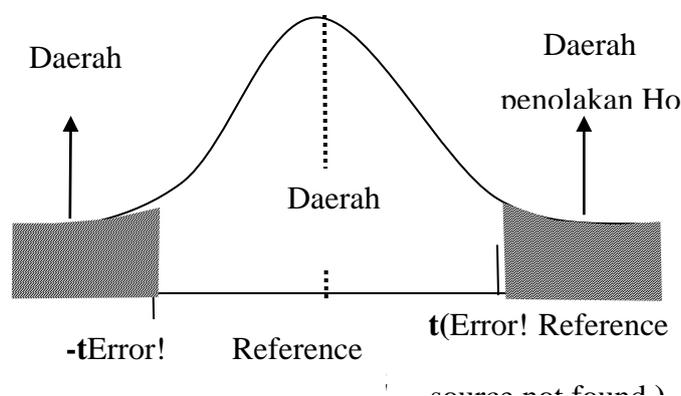
1 = jumlah variabel terikat

## 2. Uji t (uji parsial)

Uji t ini digunakan untuk menguji tingkaka tsignifikan positif atau negative mengenai pengaruh variabel bebas (X) secara individual atau secara parsial terhadap variabel tergantung (Y) (Imam Ghozali; 2011: 98). Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

a. Merumuskan formulasi atau uji hipotesis

- $H_0 : \beta_i = 0$ , artinya variabel bebas RDDF, REPD, REKD, AKD, dan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tergantung Tingkat Kemiskinan (Y).
- $H_1 : \beta_i \neq 0$ , artinya variabel bebas berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y).



**Gambar 3.2. Daerah penerimaan dan penolakan  $H_0$  untuk uji dua sisi**

b. Menghitung statistic uji t dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

keterangan:

$\beta_i$  = koefisien regresi

$S\beta_i$  = standar deviasi koefisien regresi Menarik kesimpulan

c. Untuk menarik kesimpulan pada uji t dua sisi (kanan dan kiri):

Ho diterima jika  $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$

Ho ditolak jika  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Provinsi Papua terletak pada posisi 2°25'- 9° Lintang Selatan dan 130°-141° Bujur Timur merupakan pintu gerbang wilayah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Provinsi Papua memiliki posisi strategis dalam kaitannya dengan perekonomian karena perbatasan dengan negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulai dari Negara Filipina di sebelah utara, Negara Hongkong, Negara Taiwan, Negara Jepang, hingga Kepulauan Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur, serta Negara Timor Leste dan Negara Australia di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

Provinsi Papua memiliki wilayah seluas 317.062 km<sup>2</sup> atau setara dengan 17,04 % dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>) (BPS Provinsi Papua, 2010: 3). Meskipun luas wilayahnya telah berkurang pasca pemekaran, namun Provinsi Papua masih merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia.

Selain memiliki posisi strategis serta tanah yang luas, Provinsi Papua juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Dalam sektor pertambangan misalnya, Provinsi Papua memiliki proven deposit 2,5 milyar ton bahan tambang emas dan tembaga (konsesi Freeport saja). Selain itu, 250 juta m<sup>3</sup> potensi lestari kayu komersial juga dihasilkan dari hutan di Provinsi Papua; serta 9 juta hutan konversi untuk pembangunan perkebunan skala besar. Provinsi Papua juga memiliki panjang pantai mencapai 2.000 mil dengan luas perairan 228.000

km<sup>2</sup>, dan tidak kurang dari 1,3 juta ton potensi lestari perikanan per tahun dihasilkan dari laut Papua (Djojosoekarto, 2008: 1314).

Secara administratif Provinsi Papua terbagi menjadi 32 kabupaten dan 1 Kota dengan Ibukota Provinsi terletak di Kota Jayapura. Merauke merupakan kabupaten/kota terluas (56,84 %) dan Provinsi Papua memiliki areal hutan seluas 42.198.100 ha yang terdiri dari 22.179.990 ha (52,61 %) hutan Kota Jayapura merupakan kabupaten/kota terkecil (0,10 %) di Provinsi Papua (BPS Provinsi Papua, 2011). Meskipun Provinsi Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia, namun jumlah penduduknya merupakan yang paling sedikit 2.097.482 jiwa (BPS Provinsi Papua, 2010: 87). Jika dikaitkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk di Provinsi Papua adalah sekitar 6,6 jiwa/km<sup>2</sup>.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia. Luas wilayahnya lebih dari tiga kali luas Pulau Jawa, yakni mencakup areal seluas 420.000 km<sup>2</sup> (Garnaut, 1974: 5). Berbagai kekayaan alam juga dimiliki oleh Provinsi Papua dalam jumlah yang luar biasa banyaknya, terutama dalam sektor kehutanan, pertambangan, dan perikanan.

a. Potensi Kehutanan

Areal hutan di Provinsi Papua mencakup 83,3% dari luas wilayah Provinsi Papua, dengan produksi hasil hutan yang berkualitas. Provinsi Papua memiliki areal hutan seluas 42.198.100 ha yang terdiri dari 22.179.990 ha (52,61 %) hutan produksi, 11.082.480 ha (25,60 %) hutan lindung, 7.539.300 ha (18,3 %) hutan PPA, dan 1.397.330 ha (4,49 %) (Sarjadi, 2001: 1027).

Hutan di Provinsi Papua menghasilkan beberapa produk kayu yang berharga, seperti Dipterocarpaceae dan Conifer kualitas tinggi (Garnaut, 1974: 95). Kabupaten Jayawijaya dan Merauke merupakan daerah penghasil produk hutan terbesar di Provinsi Papua. Dengan hasil hutan berupa berbagai produk kayu tersebut, pemerintah daerah Provinsi Papua (khususnya Pemda Jayawijaya dan Merauke) bisa memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar.

b. Potensi Pertambangan

Pada sektor pertambangan dan bahan galian, Provinsi Papua juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu pertambangan emas dan tembaga yang dikerjakan oleh PT. Freeport Indonesia.

c. Potensi Perikanan

Provinsi Papua juga memiliki sumber perikanan yang sangat besar. Di pantai utara dan selatan, terdapat bermacam-macam ikan yang berharga. Laut Arafura yang dangkal adalah tempat udang sedangkan lautan dalam di pantai utara dari Jayapura ke Sorong kaya akan ikan tongkol (skipjack) dan jenis ikan tuna lainnya. Di laut yang lebih dangkal dekat Sorong terdapat kumpulan jenis ikan kecil yang diperlukan sebagai umpan hidup untuk menangkap ikan tongkol. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memiliki beberapa perbedaan dengan undang-undang pemerintahan daerah di provinsi lain.

Pertama, dalam hal format pemerintahan. Provinsi Papua memiliki badan perwakilan dua kamar (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). DPRP adalah perwakilan politik yang merupakan representasi partai-partai yang memperoleh kursi dalam pemilihan umum yang merupakan badan legislatif Provinsi Papua. Sedangkan MRP adalah

representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Kedua, adalah dalam hal format keuangannya. Ada empat komponen keuangan yang membedakan antara keuangan daerah Provinsi Papua pasca otonomi khusus dengan keuangan di daerah lainnya. Keempat komponen tersebut adalah:

- (1) Dana Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% Dana Alokasi Umum Nasional setiap tahunnya;
- (2) Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan aspirasi Provinsi Papua setiap tahun anggarannya;
- (3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Minyak Bumi yang besarnya 70% (daerah lain hanya 15,5%); dan (4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Gas Alam yang besarnya 70% (daerah lain hanya 30,5%).

Alokasi penerimaan diutamakan untuk pendidikan (30%); kesehatan dan gizi (15%); pemberdayaan ekonomi masyarakat (15%); pembangunan infrastruktur kampung (12%); belanja aparatur, meliputi pemerintah provinsi, DPRD, dan MRP (8%); dan dana abadi (5%). Sisa dari penerimaan dana tersebut kemudian digunakan untuk pemberdayaan perempuan dan anak sebesar 2,28%; pembinaan kebudayaan, bahasa, dan sastra daerah 3,42%; pembinaan adat dan pemberdayaan kelembagaan adat 0,76%; pembinaan kepemudaan 0,53%;

pembinaan agama dan pemberdayaan lembaga keagamaan sebesar 3,01% (Gunawan, 2008: 95).

Dengan adanya kebijakan otonomi khusus yang disertai dengan pembiayaannya, dapat dilihat dari besarnya APBD maupun PDRB Provinsi Papua. Dimana perekonomian daerah Provinsi Papua meningkat drastis

Total APBD Provinsi Papua pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.8.912.515.550 Secara nasional, penerimaan Provinsi Papua pada tahun 2016 berada pada urutan keenam tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, dan Kalimantan Timur. Data tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari perspektif daerah, maka Provinsi Papua dapat dikategorikan sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Provinsi Papua juga sudah sejak lama diklasifikasikan sebagai daerah yang tergolong cepat maju dan cepat tumbuh. Hanya ada lima provinsi di Indonesia yang termasuk dalam klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua (Kuncoro, 2004: 123).

Tingginya pendapatan Provinsi Papua pasca otonomi khusus juga berpengaruh terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Papua. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemakmuran suatu daerah. Perhitungannya diperoleh dari jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian daerah bersangkutan yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut.

Pada tahun 2008, PDRB per kapita Provinsi Papua berada pada urutan kelima tertinggi secara nasional, dengan nilai Rp. 26.615.000. Itu berarti bahwa

rasio antara jumlah penduduk dengan pendapatan Provinsi Papua pada tahun 2008 adalah 1: Rp. 26.615.000. Maksudnya, jika pendapatan daerah tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua pada tahun tersebut, maka masing-masing orang akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 26.615.000.

Kebijakan otonomi khusus memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan perekonomian daerah Provinsi Papua secara signifikan, namun tidak berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Papua. Hingga tahun 2011, sebagian masyarakat di Provinsi Papua masih hidup didalam kondisi ketidaksejahteraan. Hal tersebut terlihat dari tingkat IPM Provinsi Papua yang pada empat tahun terakhir tidak beranjak dari posisinya sebagai provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia.

Selain itu, kondisi ketidaksejahteraan masyarakat di Provinsi Papua juga dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada bulan Maret 2011 adalah sebesar 944,79 ribu jiwa (31,98%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2010 yang berjumlah 761,62 ribu (36,80%), berarti secara jumlah bertambah sebesar 183 ribu penduduk miskin, namun secara persentase turun sebanyak 4,82%. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 30,02 juta jiwa dimana 3,15% dari jumlah tersebut merupakan penduduk Provinsi Papua. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Papua masih tergolong tinggi. Secara nasional, persentase penduduk miskin Provinsi Papua berada di peringkat tertinggi dari 33 provinsi.

Kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat di Provinsi Papua berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian daerah yang relatif kaya.

Besarnya dana otonomi khusus yang selama ini dialokasikan kepada pemerintah Provinsi Papua tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan perekonomian masyarakat di Provinsi Papua. Kebijakan otonomi khusus dapat dikatakan hanya merubah pendapatan APBD yang semakin meningkat. Sementara banyak masyarakat masih tetap hidup dibawah garis kemiskinan. Dari perbandingan APBD Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan selama sepuluh tahun pelaksanaan otonomi khusus (2002-2011), setiap pertumbuhan APBD sebesar 13,34% hanya mampu mengurangi persentase kemiskinan sebesar 0,25% saja. Padahal semestinya pertumbuhan APBD berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan otonomi khusus telah gagal mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Papua.

#### **4.2 Pengelolaan Potensi**

Potensi dan Permasalahan Kawasan Secara umum Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 Km) dengan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km<sup>2</sup>) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km<sup>2</sup>) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan juga Ikan Pelagis kecil

lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias.

Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumberdaya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

Sampan digunakan para nelayan sebagai sarana transportasi ke areal tangkap (fishing ground) dengan waktu tempuh selama 0,5 – 2 jam. Pada umumnya nelayan menggunakan perahu tanpa motor berupa perahu dayung/sampan/semang dan perahu motor. Kapasitas mesin motor yang digunakan 15 pk, 25 pk, dan 40 pk. Umumnya mesin penggerak 40 pk yang dimiliki oleh setiap kampung merupakan bantuan dari pemerintah. Namun karena harga BBM yang tinggi maka motor tersebut jarang digunakan. Secara umum sarana dan prasarana perikanan di Papua meliputi :

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Biak dan Merauke, yang masih dalam tahap studi dan diharapkan segera dibangun untuk melayani kapal-kapal perikanan yang beroperasi di Lautan Pasifik dan Laut Arafuru.

Sehingga kapal- kapal ikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional maupun kegiatan lainnya tanpa harus ke pelabuhan di luar Provinsi Papua.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Sorong.
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Jayapura, Manokwari, Kaimana, Sorong, Fak- Fak dan Mimika.
4. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI) Sentral di Masni, Kabupaten Manokwari untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan benih bagi Provinsi Papua, yang juga ditunjang oleh BBI Lokal yang tersebar hampir di seluruh kabupaten.
5. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) di Biak untuk mendukung pengembangan budidaya laut, terutama penyediaan benih ikan kepada para pembudidaya di Provinsi Papua.

Kegiatan pertambangan yang mungkin dikembangkan adalah pertambangan gas dan minyak lepas pantai dan pertambangan batubara. Pengembangan kegiatan pertambangan ini potensial, namun banyak cadangan yang belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam, terutama dampaknya terhadap lingkungan. Mengingat lokasi tambang, khusus untuk batu bara, umumnya berada pada daerah dataran di pesisir pantai atau di pulau-pulau kecil. Kegiatan pertambangan ini akan memberikan dampak yang sangat berat terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir di wilayah ini. Selain mengancam biota perairan, kegiatan ini juga mengubah keindahan bentang alamnya dan menurunkan keindahan berbagai objek wisata baik darat maupun perairan laut.

Indikasi Kebijakan Pengembangan Bentang Laut Papua Pola Pengembangan Kawasan dan Fungsi Kota Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan beberapa pusat pertumbuhan wilayah Tanah Papua yang terbagi ke dalam sembilan kawasan andalan dengan berbagai sektor unggulan yang sangat beragam. Kawasan-kawasan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan di sekitarnya, serta mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional ini kemudian disebut sebagai Kawasan Andalan. Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya. Dalam Kawasan Andalan diindikasikan sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan. Kawasan ini ditetapkan untuk mengupayakan sinergi keselarasan pengembangan antar wilayah dan sektor.

Sementara itu, yang dimaksud Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mendorong daerah sekitarnya. Kriteria yang menjadikan sebuah kota menjadi PKN antara lain berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang cakupan pelayanannya berskala nasional atau provinsi, pusat pengolahan atau pengumpul barang secara nasional atau provinsi, simpul transportasi secara nasional atau provinsi, jasa pemerintahan untuk nasional atau provinsi, dan jasa publik yang lain untuk nasional atau provinsi. Di dalam PKN, terdapat Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota yang dikategorikan PKL adalah kota

sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan pusat jasa.

### 4.3 Analisis Data

#### 1 Analisis Deskriptif

Adapun data yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada Anggaran daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua dengan pengambilan data pengutipan langsung, terdiri dari data laporan RDDF, REPD, REKD dan AKD, dan laporan tingkat kemiskinan masyarakat Papua selama periode 2004-2016, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

#### 1. Variabel RDDF

**Tabel 4.1**  
**Laporan RDDF Periode 2004-2020**

Tahun	RDDF	%
2004	6.645191153	0.066451912
2005	7.428094116	0.074280941
2006	5.245147942	0.052451479
2007	5.85640825	0.058564082
2008	6.213946495	0.062139465
2009	6.975106974	0.06975107
2010	5.858797184	0.058587972
2011	6.069128913	0.060691289
2012	8.351097456	0.083510975
2013	6.123977667	0.061239777
2014	7.116375091	0.071163751
2015	7.732731679	0.077327317
2016	5.924386522	0.059243865
2017	7.445527742	0.074455277
2018	6.716884664	0.0671688466
2019	8.114917561	0.081149176
2020	11.95937404	0.119593740

Sumber: data diolah

## 2. Variabel REPD

**Tabel 4.2**  
**Laporan REPD Periode 2004-2020**

<b>Tahun</b>	<b>REPD</b>	<b>%</b>
2004	95.25997	0.9526
2005	94.02139	0.940214
2006	153.1276	1.531276
2007	97.03514	0.970351
2008	108.0515	1.080515
2009	112.9787	1.129787
2010	87.78208	0.877821
2011	86.69255	0.866925
2012	90.54082	0.905408
2013	91.97579	0.919758
2014	94.65086	0.946509
2015	90.90708	0.909071
2016	100	1
2017	92.13697	0.921369
2018	93.3470	0.933470
2019	90.5570	0.905570
2020	92.0070	0.920070

Sumber: data diolah

### 3. Variabel REKD

**Tabel 4.3**  
**Laporan REKD Periode 2004-2020**

<b>Tahun</b>	<b>REKD</b>	<b>%</b>
2004	103.1938792	1.031939
2005	100.4872708	1.004873
2006	124.937038	1.24937
2007	109.6267586	1.096268
2008	109.8858541	1.098859
2009	113.5737891	1.135738
2010	100.199303	1.001993
2011	99.00116351	0.990012
2012	103.1004499	1.031004
2013	102.7512108	1.027512
2014	103.9406105	1.039406
2015	90.90707616	0.909071
2016	100	1
2017	100	1
2018	100	1
2019	100	1
2020	100	1

Sumber: data diolah

**4. Variabel AKD**

**Tabel 4.4**  
**Laporan AKD Periode 2004-2020**

<b>Tahun</b>	<b>AKD</b>	<b>%</b>
2004	18.9231434	0.189231
2005	11.94228841	0.119423
2006	15.86654582	0.158665
2007	23.59899679	0.23599
2008	18.22439639	0.182244
2009	16.93642623	0.169364
2010	25.18631341	0.251863
2011	19.79065088	0.197907
2012	15.88492624	0.158849
2013	13.37135077	0.133714
2014	20.10816242	0.201082
2015	220.6469851	2.206470
2016	9.046622331	0.090466
2017	47.02750100	0.470275
2018	39.65728964	0.395672
2019	27.70879386	0.277088
2020	26.39539283	0.263954

Sumber: data diolah

## 5. Variabel Tingkat Kemiskinan

**Tabel 4.5**  
**Laporan Jumlah Penduduk Miskin Periode 2004-2020**

<b>Tahun</b>	<b>%</b>
2004	29.05
2005	30.52
2006	30.89
2007	30.50
2008	30.30
2009	24.34
2010	30.39
2011	34.16
2012	31.62
2013	25.40
2014	22.60
2015	22.11
2016	22.15
2017	27.62
2018	27.74
2019	27.53
2020	26.8

Sumber: data diolah

### 4.4 Hasil Analisis Data

Hasil dari dokumentasi data perusahaan yang dikumpulkan dan setelah itu ditabulasi kemudian diolah melalui analisa regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan pertimbangan hasil regresi linier sederhana yang selengkapnya bisa dilihat pada lampiran, maka dapat dijelaskan pengaruh

RDDF ( $X_1$ ), REKD ( $X_2$ ), AKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y$ ) dengan pengujian hipotesa, melalui analisis sebagai berikut:

#### 4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil regresi antara kompensasi non finansial terhadap kinerja sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Regresi Pengaruh RDDF, REPD, REKD, AKD Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	13.504	27.192	
1 RDDF	-.232	.646	-.100
REPD	-.109	.158	-.478
REKD	.262	.374	.551
AKD	-.015	.027	-.200

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Dari hasil regresi yang didapat maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 13.504 - 0.232X_1 - 0.109X_2 + 0.262X_3 - 0.015X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai  $a$  sebesar 13.504 yang menunjukkan nilai konstanta. Artinya jika variabel bebas RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ) dan AKD ( $X_4$ ) sama dengan nol, maka tingkat kemiskinan ( $Y$ ) akan sebesar 13.504.
2. Nilai  $\beta_1$  sebesar  $-0.232$  yang menunjukkan nilai koefisien RDDF ( $X_1$ ). Artinya RDDF ( $X_1$ ) mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan ( $Y$ ) akan menurun sebesar  $-23.2\%$  dengan asumsi besarnya variabel bebas REPD ( $X_2$ ) REKD ( $X_3$ ) dan AKD ( $X_4$ ) tetap.
3. Nilai  $\beta_2$  sebesar  $-0,109$  yang menunjukkan nilai koefisien REPD ( $X_2$ ). Artinya jika REPD ( $X_2$ ) mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan ( $Y$ ) akan menurun sebesar  $-10.9\%$  dengan asumsi besarnya variabel bebas RDDF ( $X_1$ ), REKD ( $X_3$ ) dan AKD ( $X_4$ ) tetap.
4. Nilai  $\beta_3$  sebesar  $0.262$  yang menunjukkan nilai koefisien REKD ( $X_3$ ). Artinya jika REKD ( $X_3$ ) mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan ( $Y$ ) akan meningkatkan sebesar  $26.2\%$ , dengan asumsi besarnya variabel bebas RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ) dan AKD ( $X_4$ ) tetap.
5. Nilai  $\beta_4$  sebesar  $-0,015$  yang menunjukkan nilai koefisien AKD ( $X_4$ ). Artinya jika AKD ( $X_4$ ) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan ( $Y$ ) akan turun sebesar  $0,15\%$ , dengan asumsi besarnya variabel bebas RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ) dan REKD ( $X_3$ ) tetap.

#### 4.4.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji model yang dilakukan untuk melihat fit atau tidaknya model regresi dilakukan dengan menggunakan nilai  $R^2$  sebagai nilai koefisien determinasi.

Koefesien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen, dimana nilai  $R^2$  yang mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil koefesien determinasi RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Koefisien Determinasi Pengaruh RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ),**  
**AKD ( $X_4$ ) Terhadap Tingkat Kemiskinan**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 <sup>a</sup>	.701	.548	2.777

a. Predictors: (Constant), RDDDF, REPD, REKD, AKD  
 Sumber data : lampiran

Hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS maka dapat diketahui  $R^2$  yang diperoleh adalah sebesar 0.701 atau 70,1%. Artinya bahwa variabel RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) sebagai variabel bebas mempengaruhi variabel Kemiskinan (Y) sebesar 70,1%, sedangkan sisanya sebesar 29,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar penelitian ini.

#### 4.5. Pengujian Hipotesis

Hasil analisa regresi linier berganda akan dapat diketahui nilai standar koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel bebas guna menentukan tingkat signifikansi terhadap variabel terikat. Adapun hasil perhitungan dan analisa dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada uji F dan uji t dibawah ini:

## 1. Pengujian Pengaruh Simultan dengan Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel bebas motivasi kerja ( $X_1$ ), insentif ( $X_2$ ), dan disiplin kerja karyawan ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat prestasi kerja karyawan ( $Y$ ). Uji signifikansi model ini dapat dilihat pada nilai F hitung yang telah diperoleh dari program SPSS .

Hasil uji F RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y$ ) dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Kesesuaian Model**  
**Pengaruh RDDF, REPD, REKD, AKD terhadap (Y)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.750	4	10.438	4.772	.0364 <sup>b</sup>
	Residual	162.154	12	13.513		
	Total	203.904	16			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), AKD, RDDF, REPD, REKD

Sumber lampiran

Tabel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian signifikansi model dengan prosedur sebagai berikut:

a. Besarnya nilai F tabel =  $F_{\alpha} (df \text{ regresi}, df \text{ residual}) = F_{\alpha} (k ; n - k - 1)$

$$F \text{ tabel} = F_{0.05(4,12)} = 3,26$$

b. F hitung = 4.772

c. Perumusan hipotesis

- 1)  $H_0: b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$  artinya variabel RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y).
- 2)  $H_a: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$  artinya variabel bebas RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y).

d. Daerah kritis atau daerah penolakan, yaitu:

1. Bila  $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y).
2. Bila  $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y).

e. Kesimpulan

Nilai  $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$  yaitu  $4,772 \geq 3,26$  maka  $H_0$  ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikansi =  $0,036 < \alpha = 0,05$

## **2. Pengujian Pengaruh Parsial Dengan Uji t**

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial antara variabel-variabel bebas berupa RDDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Adapun analisa dengan uji t dilakukan pada ketentuan pengujian sebagai berikut :

1. Menggunakan uji dua sisi kanan dan kiri dengan tingkat signifikansi pada  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05.
2.  $H_0 = b_i = 0$ , variabel X secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap Y.
3.  $H_i = b_i \neq 0$ , variabel X secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Y.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis

Apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_i$  ditolak, sebaliknya,  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_i$  diterima.

Berkaitan dengan hal tersebut, Uji t digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dimana apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dibanding  $t_{tabel}$  maka model yang digunakan fit atau baik. Nilai  $t_{hitung}$  dapat dilihat pada hasil regresi dan nilai  $t_{tabel}$  di dapat melalui sig.  $\alpha = 0,05$  dengan  $df_1 = k$  dan  $df_2 = n - k - 1$ . Adapun rumus tersebut adalah :

$$t = n - k - 1$$

$$df = 16 - 4 - 1$$

$$df = 11 = 1,7959$$

Maka  $t_{tabel}$  adalah 1,7959

Hasil uji t variabel bebas terhadap terikat dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Analisis Uji t**  
**Pengaruh RDDF (X<sub>1</sub>), REPD(X<sub>2</sub>),REKD(X<sub>3</sub>), AKD(X<sub>4</sub>),**  
**terhadap Tingkat Kemiskinan (Y)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.504	27.192		.497	.033
1 RDDF	-.232	.646	-.100	-.358	.043
REPD	-.109	.158	-.478	-.688	.041
REKD	.262	.374	.551	.702	.059
AKD	-.015	.027	-.200	-.539	.060

a. Dependent Variable: Kemiskinan

1. Dari hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui Nilai  $t_{hitung}$  RDDF (X<sub>1</sub>) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar -0.358, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959 , hal ini menunjukkan Ho ditolak dan diterimanya H<sub>1</sub> yang menyatakan ada pengaruh positif RDDF (X<sub>1</sub>) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan RDDF (X<sub>1</sub>) sebesar 0,043 lebih kecil daripada 0,05 , jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari faktor variabel bebas yaitu RDDF (X<sub>1</sub>) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).
2. Hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui Nilai  $t_{hitung}$  REPD (X<sub>2</sub>) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar -0,688, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959 , hal ini menunjukkan Ho ditolak dan diterimanya H<sub>1</sub> yang menyatakan ada pengaruh positif REPD (X<sub>2</sub>) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan REPD (X<sub>2</sub>) dengan nilai

signifikansi 0,041 lebih kecil 0,05 , jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari faktor variabel bebas yaitu REPD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

3. Selanjutnya hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui Nilai  $t_{hitung}$  REKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 0,930, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959 hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif REKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan REKD ( $X_3$ ) dengan nilai signifikansi 0,59 lebih besar daripada 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial tetapi tidak signifikan dari faktor variabel bebas yaitu REKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).
4. Kemudian hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui Nilai  $t_{hitung}$  AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar -0,539, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959 , hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif AKD ( $X_4$ ) dengan nilai signifikan sebesar 0,60 lebih besar daripada 0,05, jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial tetapi tidak signifikan dari faktor variabel bebas yaitu AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

#### **4.6. Pembahasan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka akan interpretasikan pembahasan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil regresi diperoleh konstanta atau nilai  $\alpha$  sebesar 65,032 yang berartinya bahwa apabila semua variabel bebas nilainya nol atau tidak ada

pengelolaan keuangan daerah di provinsi Papua maka tingkat kemiskinan adalah sebesar 65,032 %, angka ini tentunya sangat besar sekali.

Variabel RDDF ( $X_1$ ) dalam hasil regresi nilai koefisiennya sebesar - 0.232 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel RDDF ( $X_1$ ) ada kenaikan 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 2,32%. Berdasarkan rumus rasio menunjukkan bahwa perbandingan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan dikalikan 100%. Rasio ini berarti bahwa Pendapatan asli daerah harus selalu ditingkatkan agar rasionya semakin besar. Rasio yang semakin besar menunjukkan semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah pada sisi pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerahnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutajulu (2011) yang menjelaskan bahwa jumlah besar pengaruh pengelolaan anggaran keuangan daerah di era otonomi daerah dapat berpengaruh terhadap penerimaan APBD daerah. Dari tabel 2.5 dan tabel 4.1 dapat dilihat kriteria dan posisi dari provinsi Papua. Dari tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa dari hasil olahan data menunjukkan prosentase yang kurang dari 25% dan ini menunjukkan bahwa provinsi Papua dalam hal kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih berada pada posisi Intruktif, atau tingkat ketergantungannya terhadap pusat masih sangat tinggi. Dari hasil analisa SPSS diketahui Nilai  $t_{hitung}$  RDDF ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar -0.358, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959, hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif RDDF ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan RDDF ( $X_1$ ) sebesar 0,043 lebih kecil daripada 0,05 , jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

parsial yang signifikan dari faktor variabel bebas yaitu RDDF ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

Variabel REPD ( $X_2$ ) dalam hasil regresi nilai koefisiennya sebesar -0,109 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel REPD ( $X_2$ ) ada kenaikan 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 10.9 %. Berdasarkan rumus rasio menunjukkan bahwa perbandingan Realisasi Pendapatan dibagi dengan Anggaran Pendapatan dikalikan 100%. Rasio ini berarti bahwa Realisasi Pendapatan harus selalu ditingkatkan agar rasionya semakin besar. Rasio yang semakin besar menunjukkan semakin efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel 2.6 dan tabel 4.2 dapat dilihat kriteria dan posisi dari provinsi Papua. Dari tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa dari hasil olahan data menunjukkan prosentase efektifitas yang kurang dari 100 % dan ini menunjukkan bahwa provinsi Papua dalam hal efektifitas pengelolaan keuangan daerah masih berada pada posisi tidak efektif, tetapi prosentasenya sudah mendekati 100% yaitu rata-rata 90%. Hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel diatas diketahui Nilai  $t_{hitung}$  REPD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar -0,688, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959, hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif REPD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan REPD ( $X_2$ ) dengan nilai signifikansi 0,041 lebih kecil 0,05 , jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari faktor variabel bebas yaitu REPD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

Variabel REKD ( $X_3$ ) dalam hasil regresi nilai koefisiennya sebesar 0.262 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel REKD ( $X_3$ ) ada kenaikan 1% maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 26.2%. Berdasarkan rumus rasio

menunjukkan bahwa perbandingan Realisasi Belanja Daerah dibagi dengan Realisasi Pendapatan Daerah dikalikan 100%. Hasil dari rasio ini harus kecil prosentasenya karena Realisasi Belanja Daerah seharusnya harus lebih kecil dari Realisasi Pendapatan Daerah. Rasio yang semakin kecil menunjukkan semakin efisien pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel 2.7 dan tabel 4.3 dapat dilihat kriteria dan posisi dari provinsi Papua. Dari tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa dari hasil olahan data menunjukkan prosentase efisiensi bila kurang dari 100 % dan ini menunjukkan bahwa provinsi Papua dalam hal efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih berada pada posisi belum efisien karena hasil rasio menunjukkan rata-rata lebih besar dari 100%, yang berarti Realisasi Belanja Daerah sama dengan Realisasi Pendapatan Daerah. Kriteria dari rasio REKD ( $X_3$ ) adalah bila hasil rasio lebih kecil menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah efisien. Oleh karena itu bila REKD ( $X_3$ ) semakin kecil maka tingkat kemiskinan akan menurun. Hasil analisa SPSS diketahui Nilai  $t_{hitung}$  REKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 0.702 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959, hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh parsial REKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan REKD ( $X_3$ ) dengan nilai signifikansi 0,059 lebih besar 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial tetapi tidak signifikan dari faktor variabel bebas yaitu REKD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Atau dapat disimpulkan bahwa variabel REKD ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) tetapi pengaruhnya sangat kecil.

Variabel AKD ( $X_4$ ) Variabel dalam hasil regresi nilai koefisiennya sebesar -0.015 hal ini menunjukkan bahwa variabel AKD ( $X_4$ ) ada kenaikan 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 1.5 %. Rasio dari AKD atau tingkat keserasian dalam pengelolaan keuangan adalah Belanja Modal dibagi Belanja Daerah dikalikan 100% . Rasio ini belum ada kriteria yang bisa dijadikan tolok ukur, tetapi dari rasio tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal sangatlah penting bagi Provinsi Papua untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan belanja modal maka pembangunan sarana dan prasarana dapat diwujudkan untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Sesuai dengan penelitian Pramad Yanti (2015) yang menyatakan bahwa penelitian tentang Belanja Modal menunjukkan berpengaruh negative sebab perlu adanya pemisahan antara belanja yang digunakan untuk kepentingan aparatur dan untuk belanja publik. Kemudian dari hasil analisa diketahui Nilai  $t_{hitung}$  AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar - 0,539, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959, hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif AKD ( $X_4$ ) dengan nilai signifikan sebesar 0,60 lebih besar daripada 0,05, jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial tetapi tidak signifikan dari faktor variabel bebas yaitu AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

Tingkat Kemiskinan (Y) di provinsi Papua tergolong tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain , rata-rata menunjukkan berkisar antara 22% sampai dengan 34% . Masih tingginya tingkat kemiskinan maka pemerintah daerah Papua harus bekerja keras dalam pengelolaan keuangan Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Anggaran daerah terhadap RDDF ( $X_1$ ), REKD ( $X_2$ ), AKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). jadi data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) dan data Tingkat Kemiskinan (Y) Provinsi Papua Periode 2004 sampai dengan 2020. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji  $R^2$  dan hasil dari adjusted  $R^2$  sebesar 0,701 yang berarti bahwa variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 70,1% dan sisanya 29.1 % dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.
2. Nilai F hitung  $\geq$  F tabel yaitu  $4,772 \geq 3,26$  maka  $H_0$  ditolak , hal ini menunjukkan bahwa variabel RDDF ( $X_1$ ), REPD ( $X_2$ ), REKD ( $X_3$ ), AKD ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikasi =  $0,0364 < \alpha = 0,05$
3. Dari hasil analisa diketahui nilai  $t_{hitung}$  RDDF ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar -0.358, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959, hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif RDDF ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan RDDF ( $X_1$ ) sebesar 0,043 lebih kecil daripada 0,05 , jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari faktor variabel bebas yaitu RDDF ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

4. Hasil analisa diketahui Nilai  $t_{hitung}$  REPD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar -0.688, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959, hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif REPD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan REPD ( $X_2$ ) dengan nilai signifikansi 0,041 lebih kecil 0,05 , jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari faktor variabel bebas yaitu REPD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).
5. Selanjutnya hasil analisa diketahui Nilai  $t_{hitung}$  REKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 0,702, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959 hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif REKD ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Dengan tingkat signifikan REKD ( $X_3$ ) dengan nilai signifikansi 0,059 lebih besar daripada 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial tetapi tidak signifikan dari faktor variabel bebas yaitu REKD ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).
6. Kemudian hasil analisa diketahui Nilai  $t_{hitung}$  AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 0,539, lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,7959, hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan diterimanya  $H_1$  yang menyatakan ada pengaruh positif AKD ( $X_4$ ) dengan nilai signifikan sebesar 0,60 lebih besar daripada 0,05, jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial tetapi tidak signifikan dari faktor variabel bebas yaitu AKD ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

7. Dari Hasil Rasio menunjukkan bahwa tingkat kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah masih kurang atau masih tergantung pada pemerintah pusat. Perhitungan rasio efisien dan efektif menunjukkan bahwa pemerintah Papua belum efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan Daerah.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah Propinsi Papua diharapkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar pemerintah propinsi dapat menyelenggaran desentralisasi fiscal daerah yang lebih maju yang dalam hal ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua (BKPMMD) untuk lebih cermat dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat memberikan perkembangan pada wilayah Propinsi Papua itu sendiri dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Papua.
2. Sedangkan mengenai Efisiensi Keuangan Daerah diharapkan pemerintah provinsi dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan daerah saat akan mengalokasikan dana yang akan digunakan baik untuk pembangunan ataupun untuk perkembangan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan yang dilakukan

oleh pemerintah propinsi Papua dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Papua.

3. Kemudian mengenai Aktivitas Keuangan Daerah yang dipakai pemerintah propinsi diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk perkembangan dan pertumbuhan perekonomian terutama untuk masyarakat Papua sehingga masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Papua.
4. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 13 tahun 2011, diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah terutama pada pemerintah daerah Propinsi Papua untuk dapat memberikan bantuan yang berupa sandang, pangan, papan, dan penyediaan pelayanan perumahan bagi masyarakat miskin, penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal, penyediaan pelayanan pendidikan, Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha serta penyediaan fasilitas bantuan permodalan, sehingga masyarakat Propinsi Papua dapat berkembang dengan melakukan usaha dalam meningkatkan taraf hidupnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Richard M., Vaillancourt, Francois., 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- BPS Provinsi Papua, 2010. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Tahun 2010-2014*.
- Deiningner, Klaus dan Squire, L, 1996, *Measuring Inequality: A New Data Base, World Bank*. <http://www.worldbank.org/research/growth/dddeisqu.htm>.
- Dritsakis, Nikolas dan Adamopoulos, Antonis. 2004. *A Causal Relationship Between Government Spending and Economic Development: An Empirical Examination of the Greek Economy*. *Journal Applied Economics*.
- Djojosoekarto, Agung dkk. 2008. *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Kemitraan.
- Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- Ferreira, Francisco H.G, 1999, *Inequality And Economic Performance: A Brief Overview To Theories Of Growth And Distribution*, World bank, June. (<http://www.worldbank.org/poverty/inequal/index.htm>)
- Garnaut, Ross & Chris Manning. 1974. *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Djaya Pirusa.
- Gunawan, FX Rudi. 2008. *Luka Papua: HIV, Otonomi Khusus, dan Perang Suku*. Jakarta: Spasi & VHR Book.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. UUP STIM.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Hutajulu, 2011. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jayapura Papua*. *Jurnal*.
- Ismawan 2003. *Usaha Kecil Dan Menengah*, Yogyakarta : Andi Offset. Imanuel Arifin, 2000. *Diklat Mata Kuliah, Kemiskinan Dan Pendekatan-Pendekatannya*. Magister Administrasi Public Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Imam Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Semarang: Universitas Diponegoro.

- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta. Penerbit: Erlangga.
- Kurniati, 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Pramad Yanti, 2015. Pengaruh dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan di Provinsi Papua. *Jurnal*.
- Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). 1998. Badan Pusat Statistik.
- Stiglitz, Joseph. 2000. *Globalization and its Discontent*, Penguin Books, London.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Siagian, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Saraun, 2013. *Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Terhadap Belanja Modal Pendapatan Perkapita Antar Kabupaten Kota Di Provinsi Papua*. *Jurnal*.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus UU Otsus bagi Provinsi Papua*, yang ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 21 November 2001. Pada tahun 2003.
- Undang-Undang Pemerintah Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	AKD, RDDF, REPD, REKD <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 <sup>a</sup>	.701	.548	3.676

a. Predictors: (Constant), AKD, RDDF, REPD, REKD

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.750	4	10.438	4.772	.0364 <sup>b</sup>
	Residual	162.154	12	13.513		
	Total	203.904	16			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), AKD, RDDF, REPD, REKD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.504	27.192		.497	.033
	RDDF	-.232	.646	-.100	-.358	.043
	REPD	-.109	.158	-.478	-.688	.041
	REKD	.262	.374	.551	.702	.059
	AKD	-.015	.027	-.200	-.539	.060

a. Dependent Variable: Kemiskinan

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4.

```

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	AKD, RDDF, REPD, REKD <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.452 <sup>a</sup>	.205	-.060	3.676	.205	.772	4	12	.564

a. Predictors: (Constant), AKD, RDDF, REPD, REKD

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.750	4	10.438	.772	.564 <sup>b</sup>
	Residual	162.154	12	13.513		
	Total	203.904	16			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), AKD, RDDF, REPD, REKD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.504	27.192		.497	.628
	RDDF	-.232	.646	-.100	-.358	.726
	REPD	-.109	.158	-.478	-.688	.505
	REKD	.262	.374	.551	.702	.496
	AKD	-.015	.027	-.200	-.539	.600

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel F (0,05)

df2	df1				
	1	2	3	4	5
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400

df2	df1				
	1	2	3	4	5
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397
52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350
69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305

Tabel t

df	0.025	0.05	0.1
1	25.452	12.706	6.314
2	6.205	4.303	2.920
3	4.177	3.182	2.353
4	3.495	2.776	2.132
5	3.163	2.571	2.015
6	2.969	2.447	1.943
7	2.841	2.365	1.895
8	2.752	2.306	1.860
9	2.685	2.262	1.833
10	2.634	2.228	1.812
11	2.593	2.201	1.796
12	2.560	2.179	1.782
13	2.533	2.160	1.771
14	2.510	2.145	1.761
15	2.490	2.131	1.753
16	2.473	2.120	1.746
17	2.458	2.110	1.740
18	2.445	2.101	1.734
19	2.433	2.093	1.729
20	2.423	2.086	1.725
21	2.414	2.080	1.721
22	2.405	2.074	1.717
23	2.398	2.069	1.714
24	2.391	2.064	1.711
25	2.385	2.060	1.708
26	2.379	2.056	1.706
27	2.373	2.052	1.703
28	2.368	2.048	1.701
29	2.364	2.045	1.699
30	2.360	2.042	1.697
31	2.356	2.040	1.696
32	2.352	2.037	1.594
33	2.348	2.035	1.692
34	2.345	2.032	1.691
35	2.342	2.030	1.690
36	2.339	2.028	1.688
37	2.336	2.026	1.687
38	2.334	2.024	1.686
39	2.331	2.023	1.685
40	2.329	2.021	1.684
41	2.327	2.020	1.683
42	2.325	2.018	1.682
43	2.323	2.017	1.681
44	2.321	2.015	1.680
45	2.319	2.014	1.679
46	2.317	2.013	1.679
47	2.315	2.012	1.678
48	2.314	2.011	1.677
49	2.312	2.010	1.677
50	2.311	2.009	1.676

df	0.025	0.05	0.1
51	2.310	2.008	1.675
52	2.308	2.007	1.675
53	2.307	2.006	1.674
54	2.306	2.005	1.674
55	2.304	2.004	1.673
56	2.303	2.003	1.673
57	2.302	2.002	1.672
58	2.301	2.002	1.672
59	2.300	2.001	1.671
60	2.299	2.000	1.671
61	2.298	2.000	1.670
62	2.297	1.999	1.670
63	2.296	1.998	1.669
64	2.295	1.998	1.669
65	2.295	1.997	1.669
66	2.294	1.997	1.668
67	2.293	1.996	1.668
68	2.292	1.995	1.668
69	2.291	1.995	1.667
70	2.291	1.994	1.667
71	2.290	1.994	1.667
72	2.289	1.993	1.666
73	2.289	1.993	1.666
74	2.288	1.993	1.666
75	2.287	1.992	1.665
76	2.287	1.992	1.665
77	2.286	1.991	1.665
78	2.285	1.991	1.665
79	2.285	1.990	1.664
80	2.284	1.990	1.664
81	2.284	1.990	1.664
82	2.283	1.989	1.664
83	2.283	1.989	1.663
84	2.282	1.989	1.663
85	2.282	1.988	1.663
86	2.281	1.988	1.663
87	2.281	1.988	1.663
88	2.280	1.987	1.662
89	2.280	1.987	1.662
90	2.280	1.987	1.662
91	2.279	1.986	1.662
92	2.279	1.986	1.662
93	2.278	1.986	1.661
94	2.278	1.986	1.661
95	2.277	1.985	1.661
96	2.277	1.985	1.661
97	2.277	1.985	1.661
98	2.276	1.984	1.661
99	2.276	1.984	1.660
100	2.276	1.984	1.660



YAYASAN PENDIDIKAN  
CENDEKIA UTAMA  
UNIVERSITAS DR. SOETOMO  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Semolowaru 84 Surabaya, 60118 Telp. (031) 5925970, 5924452, Fax. (031) 5938935  
website: <http://unitomo.ac.id> Email : [lemlit@unitomo.ac.id](mailto:lemlit@unitomo.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS  
PENELITIAN MANDIRI UNITOMO  
TAHUN AJARAN GENAP 2020 – 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jajuk Suprijati,SE.,MM  
NIDN : 0727037001  
Pangkat / Golongan : Penata Muda / IIIb  
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA « **bersifat original ditunjukkan dengan hasil plagiasi sebesar kurang dari 30 %**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Universitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 29 Juni 2021

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian,

Yang menyatakan,

  
D.F. Radjar Kurnia Hartati, MP  
NPP: 95.01.1.198



Jajuk Suprijati,SE,MM  
NPP: 98.01.1.280

# ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Pasundan University Student Paper	8%
2	Submitted to Cedar Valley College Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	2%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches

< 130 words